

**PENGARUH MASUKNYA PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
(PMI) NON PROSEDURAL DI MALAYSIA TERHADAP  
PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA DI  
KABUPATEN KARIMUN**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Oleh :

**Rizki Zuriati**  
NIM 14230053

Dosen Pembimbing :

**Suyanto, S.Sos, M.Si**  
NIP 19660531 198801 1 001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 55230  
Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-2628/Un.02/DD/PP.05.03/11/18

Tugas Akhir dengan Judul : **Pengaruh Masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Malaysia Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kabupaten Karimun.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rizki Zuriati  
Nomor Induk Mahasiswa : 14230053  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Suyanto, S.Sos., M.Si  
NIP. 19660531 198301 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.  
NIP. 19610410 199001 1 001

Dr. Aziz Muslim M.Pd  
NIP. 19700528 199403 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rizki Zuriati  
NIM : 14230053  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul Skripsi : Pengaruh Masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Malaysia Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kabupaten Karimun.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Mengetahui,

Pembimbing,

Suyanto, S.Sos., M.Si  
NIP: 19660531 198801 1 001

Ketua Prodi PMI,

Dr. Pajar Hartana Indra Jaya, M. Si  
NIP: 19810428 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Zuriati  
NIM : 14230053  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul “Pengaruh masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia terhadap peningkatan perekonomian keluarga di Kabupaten Karimun” adalah hasil dari karya saya sendiri dan tidak mengandung plagiarisme, dan tidak berisi tentang materi-materi yang dipublikasikan oleh pihak lain, terkecuali memang membutuhkan bagian-bagian tertentu sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar adanya, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Rizki Zuriati

NIM 14230053

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis hadiahkan kepada:

*Ibunda terkasih (Nurasiah), Ayahanda tercinta (Syahril),  
dan adek tersayang satu-satunya (Muhammad Ikhsan Affandillah).*

.  
. .  
. . .  
. . . .

*Hempasan ombak yang tak pernah penat berbuih  
Menghentam karang yang tegak tiada runtuh tak bertali  
Kepada kawan yang senantiasa tercinta dan berkasih  
Ridhoi saya berkhidmat di kampung halaman untuk kembali*

**Terima kasih Jogjakarta**

## **MOTTO**

*Jika hendak mengenal orang yang berilmu,*

*Bertanya dan belajar tiadalah jemu.*

*Jika hendak mengenal orang yang berakal,*

*Di dalam dunia mengambil bekal.*

Gurindam Dua Belas

Pasal ke lima, bait empat dan lima.

Gubahan:

**Raja Ali Haji**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah subhanahuata'ala, karena dengan Dia lah saya bisa menulis dan menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul “Pengaruh Masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Malaysia terhadap Peningkatan Perekonomian di Kabupaten Karimun” ini dengan baik, walaupun harus menjalaninya dengan penuh cobaan dan ujian. Sholawat serta salam saya hadiahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang.

Proses lika-liku dalam menulis skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Dan dengan itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, terima kasih yang keluar dari hati nurani penulis sendiri, terima kasih itu penulis hantarkan kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M. A, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M. Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Suyanto, S.Sos, M, Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa ikhlas membimbing penulis dari awal proposal hingga ke skripsi.

5. Dr. Aziz Muslim, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan ibu dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
7. Pihak pemerintahan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perekonomian Sekretariat Daerah, BPS, Kantor Imigrasi kelas II, dan P4TKI, dan semua para TKI ilegal yang telah sudi membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Syahril dan Ibu Nurasih yang tidak pernah lupa mendoakan penulis di tanah rantau. Yang selalu menjadi orang nomor satu penulis rindukan ketika menginjak tanah Jogjakarta.
9. Nenek tercinta Hj. Esah yang selalu memberi nasehat kepada penulis, dan selalu membuat penulis rindu akan masakannya.
10. Keluarga besar Tok Rahman Led yang selalu memberikan keceriaan dan tawa dalam setiap pertemuan dan cerita.
11. Teman-teman Astaghfirullah yang sudah mendahului dan meninggalkan penulis sendirian di Jogja (Kakak pertama Arina Bariroh, S.Sos, Kakak kedua Nugrahani Kusumastuti, S. Sos, dan adek bungsu Annisa Ayu Latifah, S.Sos) yang senantiasa penulis rindu candaan dan kemitungannya. Dan sobat-sobat cengir (Aweng, Edi, Fajar, Adit, Okoy), semoga kita semua menjadi orang sukses dan tidak akan pernah melupakan satu sama lain.
12. Teman-teman PMI 2014, terkhususnya teman-teman grup “Pejuang TERakhir” yang dilambangkan dengan logo rokok Sampoerna.
13. Teman-teman TEATER ESKA, terkhusus, tersayang, tercinta, terrindu angkatan XX, kalian yang membuat penulis nyaman



untuk hidup di Jogjakarta, teman-teman yang selalu membuat penulis paham akan arti kekeluargaan (tanpa ikatan darah), dan hidup dalam kesederhaan, ahhh itu terlalu bahagia. Dan juga kepada teman-teman XXI, dan para anggota-anggota sebelumnya juga (teman-teman XVII-XIX) terima kasih telah mau menerima Ririzzurizki di sanggar.

14. Teman-teman SD penulis yang sangat dekil dulunya (Totok Setiawan, Rudy Boy, Putri Wanda Pratiwi), jangan lupakan ibu Zuryanita.
15. Teman-teman SMP penulis yang sangat cupu dulunya (Suchy Winia Utami, Qodry Handriyani, Rabiah, Novi Indah Fatmala Lubis, Rendy Ade Sukma, Tiar Alvacino), rebutlah bahagia kalian masing-masing, walaupun terkadang lebih bahagia kalau kita kumpul bersama dari pada duduk masing-masing.
16. Teman-teman SMA penulis yang “kalem” (Nur Fadizah Hafni, S,Si, Ulvi Nikmawati, S. Pd, Ayudia Paramitha Z, Rika Marlianti) semoga selalu menjadi wanita-wanita sholehah, kalian teman yang selalu membuat penulis diingatkan perihal agama.
17. Teman terHOT penulis, mbak Gita Melinda, S.Pd, terima kasih telah sudi memperbolehkan penulis mengenal Melly, Milli, Milla, dan Millo.
18. Teman-teman PPM PKH 2 (Dulfikar, Noviansyah, Miftah, Ardy, Ipah, Bowo, Jayyidan, Siti, Anom)
19. Teman-teman KKN dusun Suru Kidul, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedang Sari Gunung Kidul. (Rani, Dila, Marta, Ipeh, Mas Bima, Widhi, Nur, Adit).

20. Teman-teman daerah seperjuangan KPMKR-KKJ (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kepulauan Riau – Kabupaten Karimun Jogjakarta).

Sekali lagi penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan penulis meminta maaf jika dalam penulisan ini ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga yang sudah membantu dan mendoakan penulis dalam pengerjaan, menjadi sisi baik untuk sesama dan diterima oleh Allah SWT. Demikian, semoga apa yang penulis usahakan mendapatkan ridho dan manfaat bagi nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Penulis

Rizki Zuriati  
NIM 14230053

## ABSTRAK

Rizki Zuriati, Pengaruh Masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kabupaten Karimun, *Skripsi*, Yogyakarta: Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten yang terletak berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Perjalanan hampir 45 menit menggunakan kapal laut sangat mudah, tempat tujuan yang paling dekat adalah Johor. Karena akses yang mudahlah membuat sebagian masyarakat Kabupaten Karimun mencari pekerjaan ke Malaysia, dengan menggunakan paspor pelancong tapi inti kedatangan sebenarnya adalah untuk bekerja, maka hal ini bisa disebut dengan TKI ilegal atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan PMI non prosedural.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan cara masuknya TKI ilegal ke Malaysia dan dampak bekerjanya terhadap peningkatan perekonomian keluarga para PMI non prosedural tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan teknik penentuan informannya menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Proses mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian melakukan validasi data dengan metode triangulasi sumber dan datanya. Dan selanjutnya adalah bagian analisis data yaitu dengan proses reduksi data, penyajian, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses masuknya setiap warga Kabupaten Karimun yang bekerja di Malaysia menggunakan paspor pelancong, dan membayar uang *guarantee* kepada pihak petugas sesuai dengan jenis pekerjaan yang didapati di Malaysia, sedangkan dampak dari masuknya TKI ilegal atau PMI non prosedural ke Malaysia terhadap peningkatan perekonomian keluarganya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mampu membuat

ekonomi keluarga berkecukupan. Namun, sesuai dengan UU no 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, hal ini sudah melanggar aturan, namun harus dilihat juga konsekuensinya bagaimana, sebab dampak positif dalam hal ini lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif.

**Kunci:** TKI ilegal, Peningkatan Perekonomian, Kabupaten Karimun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Kerangka Teori .....	12
H. Metode Penelitian .....	27
I. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON PROSEDURAL DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN KARIMUN</b> .....	<b>36</b>
A. PMI non prosedural di Malaysia dari Kabupaten Karimun .....	36
B. Masyarakat Kabupaten Karimun dan Ekonomi Keluarganya.....	42

<b>BAB III: PROSES MASUKNYA TKI ILEGAL KE MALAYSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA .....</b>	<b>52</b>
A. Masuknya TKI ilegal ke Malaysia .....	52
B. Dampak masuknya TKI ilegal terhadap peningkatan perekonomian keluarganya.....	67
C. Penguraian terkait TKI ilegal dari Kabupaten Karimun ke Malaysia.....	87
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>107</b>
<b>PEDOMAN OBSERVASI .....</b>	<b>112</b>
<b>PEDOMAN DOKUMENTASI.....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Garis kemiskinan Kabupaten Karimun.....	44
Tabel 2 :	Tingkat Pengangguran Kabupaten Karimun 2017 .....	49
Tabel 3 :	Perkembangan dan perubahan nilai UMR Kabupaten Karimun.....	50
Tabel 4:	Harga tiket semua kapal ferry tujuan Kukup.....	54
Tabel 5 :	Harga tiket semua kapal ferry tujuan Harbour Puteri.....	56
Tabel 6 :	Statistik pelayanan keimigrasian kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta jarak antara Karimun dan Malaysia .....	37
Gambar 2	: Kondisi tempat pembayaran boarding pass di pelabuhan Puteri Harbour Malaysia .....	39
Gambar 3	: Kapal ferry Tuah tujuan Kukup dan Harbour Puteri Malaysia .....	53
Gambar 4	: Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun .....	54
Gambar 5	: Peta wilayah perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Kukup Malaysia.....	55
Gambar 6	: Pelabuhan Internasional Kukup Malaysia .....	55
Gambar 7	: Peta jarak antara Tanjung Balai Karimun ke pelabuhan Harbour Puteri Johor Malaysia.....	56
Gambar 8	: Pelabuhan Internasional Harbour Puteri Johor Malaysia .....	57
Gambar 9	: Isian salah satu paspor TKI ilegal .....	60
Gambar 10	: Harga kurs Rupiah pada bulan Oktober 2018 .....	67
Gambar 11	: Kediaman Novi dan keluarganya di Teluk Uma Karimun .....	71
Gambar 12	: Kegiatan Novi sedang menjadi kasir dikedai runcit milik saudaranya di Batu Pahat, Johor Bahru Malaysia.....	72
Gambar 13	: Kediaman Bapak Tamrin di Sungai Buluh Kecamatan Ungar .....	76
Gambar 14	: Kegiatan Tiar sedang mengikat besi untuk membuat bangunan perkantoran 40 lantai.....	80
Gambar 15	: Tampak dari depan rumah Pak Cik Amri.....	86
Gambar 16	: Rumah Pak Cik Amri sedang direnovasi.....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Proposal penelitian ini berjudul **“Pengaruh Masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Malaysia terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kabupaten Karimun”**. Agar mampu mendeskripsikan maksud dan tujuan dari judul tersebut maka penulis menuturkan penjelasan sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Pengaruh Masuknya PMI non prosedural di Malaysia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang - berbeda dengan kekuasaan - tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.<sup>2</sup> Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaruh adalah sesuatu yang membuat perubahan untuk suatu benda maupun orang, yang ada dampaknya dan terlihat jelas bagaimana proses terjadinya.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga – cetakan 3, 2005, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 849

<sup>2</sup> <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-pengaruh-menurut-beberapa.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 14:27

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau dulu lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>3</sup> TKI ilegal berarti warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan sistem ilegal. Ilegal sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak menurut hukum; tidak sah.<sup>4</sup> Sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural menurut penulis disini adalah orang-orang yang tidak menurut hukum masuk ke salah satu negara untuk bekerja dengan menggunakan paspor pelancong. Penyalahgunaan paspor yang menjadi modal utama untuk mereka menjadi PMI non prosedural.

Pengaruh masuknya PMI non prosedural di Malaysia sangat sering terjadi, bahkan selalu ada berita terkait masalah ini, baik itu masyarakat dari tanah Jawa maupun masyarakat daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan. sebab Malaysia merupakan negara yang paling terdekat dari Indonesia dan merupakan negara yang berkembang pesat dalam sumber daya manusianya. Dikarenakan perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia sangat tidak seimbang, dan negara Malaysia banyak membutuhkan tenaga kerja untuk sektor formal

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia) diakses pada tanggal 25 Mei 2018

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga – cetakan 3, 2005, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 423

maupun informal terutama untuk perkebunan dan juga untuk kepentingan individu warganya, maka sebagian masyarakat Indonesia memilih bekerja di Malaysia, dan Malaysia memiliki upah minimum yang lebih besar dibandingkan negara Indonesia sendiri.

**b. Peningkatan Perekonomian Keluarga**

Peningkatan berasal dari kata "*tingkat*". Yang artinya menurut KBBI adalah (1) tinggi martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya); pangkat; derajat; taraf; kelas. (2) batas waktu (masa); sempadan suatu peristiwa (proses, kejadian, dan sebagainya).<sup>5</sup>

Sedangkan Ekonomi menurut KBBI adalah (4) urusan keuangan rumah tangga.<sup>6</sup> Sedangkan keluarga adalah ibu, bapak beserta anak-anaknya. Jadi maksud dari peningkatan nilai ekonomi keluarga menurut penulis adalah proses kemajuan urusan keuangan rumah tangga seseorang, apakah ekonomi yang dimiliki berkecukupan, kurang atau bahkan lebih.

**c. Kabupaten Karimun**

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km<sup>2</sup>, dengan luas

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga – cetakan 3, 2005, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 1197

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga – cetakan 3, 2005, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 287

daratan 1.524 km<sup>2</sup> dan luas lautan 6.460 km<sup>2</sup>. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni.

Adapun batas-batas Kabupaten Karimun yaitu. Utara : Selat Singapura (Philip Channel), Selat Melaka dan Semenanjung Malaysia. Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga. Barat : Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan). Dan Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka maksud dengan judul Pengaruh Masuknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Malaysia Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kabupaten Karimun adalah sebuah penelitian yang akan membahas tentang pengaruh dan dampak bagaimana Tenaga Kerja Indonesia ilegal beserta proses cara masuknya ke negara Malaysia terhadap peningkatan perekonomian keluarganya masing-masing serta pekerjaan-pekerjaan apa saja yang mereka dapatkan di Malaysia dan hasil upah yang didapatkan, sehingga mereka bisa meningkatkan perekonomian keluarganya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting dan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang

masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.<sup>7</sup>

Sektor pertanian merupakan sumber utama penghasilan sebagian besar penduduk Kabupaten Karimun yang dikelompokkan kedalam 5 sub sektor. Yaitu Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Perkebunan. Di antara kelima sub sektor pertanian yang terdapat di Kabupaten Karimun, sub sektor yang paling menonjol peranannya adalah sub sektor perikanan. Hal ini wajar mengingat kondisi geografis Kabupaten Karimun terdiri atas wilayah lautan yang cukup luas yang kaya akan potensi perikanan dan hasil laut lainnya.<sup>8</sup>

Sehingga banyak masyarakat Kabupaten Karimun khususnya wilayah pesisir bekerja sebagai nelayan. Produksi subsektor perikanan yang ada di Kabupaten Karimun berasal dari tiga tempat, yaitu penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan. Hingga saat ini, hasil produksi perikanan lebih didominasi oleh hasil penangkapan ikan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan wilayah daratan, masyarakat Kabupaten Karimun bekerja sebagai karyawan perusahaan-perusahaan swasta dengan jumlah sebanyak 213 perusahaan.<sup>10</sup> Berdasarkan jumlah

---

<sup>7</sup> Profil Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2015., hlm. 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>9</sup> [https://www.researchgate.net/profile/Erie\\_Sadewo/publication/311901529\\_Indikator\\_Ekonomi\\_Kabupaten\\_Karimun\\_Tahun\\_2014/links/5860c38708ae8fce49041e73/Indikator-Ekonomi-Kabupaten-Karimun-Tahun-2014.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Erie_Sadewo/publication/311901529_Indikator_Ekonomi_Kabupaten_Karimun_Tahun_2014/links/5860c38708ae8fce49041e73/Indikator-Ekonomi-Kabupaten-Karimun-Tahun-2014.pdf) diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 22:46.

<sup>10</sup> <https://karimunkab.go.id/perkembangan-investasi-kabupaten-karimun/> diakses pada tanggal 20 Desember pukul 23:30.

tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi adalah berjumlah 9.818 orang.<sup>11</sup>

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun tahun 2017 sebesar Rp. 2.617.000,00, sedangkan pendapatan nelayan kisaran 2 jutaan per bulan dan gaji para karyawan biasa PT dan CV kisaran 2,5 juta-5 Juta. Nilai ekonomi para nelayan di Kabupaten Karimun banyak yang rendah karena di bawah UMK, namun untuk pekerja karyawan PT dan CV setara dengan UMK, atau bahkan lebih dari UMK.<sup>12</sup>

Dari seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Karimun, lebih dari setengah diantaranya termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari 62,43 % pada tahun 2013 menjadi 63,97% pada tahun 2014. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 tercatat 6,64%. Hingga pada akhirnya masyarakat Kabupaten Karimun mencari jalan lain dan memilih menjadi PMI non prosedural.

PMI non prosedural bukanlah jalan utama untuk mencari nafkah kehidupan berumah tangga. Pekerjaan itu dipilih terutama lantaran desakan dan hasil yang didapatkan lumayan besar, sekaligus tidak menuntut pelamar syarat-syarat yang terpenuhi

---

<sup>11</sup>[https://www.researchgate.net/profile/Erie\\_Sadewo/publication/311901529\\_Indikator\\_Ekonomi\\_Kabupaten\\_Karimun\\_Tahun\\_2014/links/5860c38708ae8fce49041e73/Indikator-Ekonomi-Kabupaten-Karimun-Tahun-2014.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Erie_Sadewo/publication/311901529_Indikator_Ekonomi_Kabupaten_Karimun_Tahun_2014/links/5860c38708ae8fce49041e73/Indikator-Ekonomi-Kabupaten-Karimun-Tahun-2014.pdf) diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 00:24

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rahimah, M.E, Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun. Diwawancarai pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 20:17 wib.

serta ikatan kontrak dengan majikan/perusahaan yang menerima. Ditambah lagi dengan mudah dan murah nya pembuatan paspor di sana. Malaysia menjadi tujuan untuk menjadi PMI. Hal itu, karena letak wilayah kabupaten Karimun bersebelahan langsung dengan Johor Malaysia.

Menjadi PMI non prosedural sangat mudah menurut sebagian masyarakat Kabupaten Karimun, sebab pembuatan paspor dan mudahnya transportasi yang didapat menjadi jalan utama untuk mereka masuk ke Malaysia. PMI disini menggunakan paspor turis/pelancong sebagai paspor untuk mencari pekerjaan, sedangkan yang kita ketahui paspor turis tersebut tidak boleh digunakan sebagaimana mestinya yang sudah ditetapkan.

Malaysia banyak membutuhkan tenaga kerja untuk sektor formal maupun informal terutama untuk perkebunan dan juga untuk kepentingan individu warganya. Kebanyakan PMI yang bekerja di Malaysia merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik, yang biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun buruh di sektor perkebunan kelapa sawit. Bahkan dari mereka ada yang nekat menjadi tenaga kerja illegal.<sup>13</sup>

Hasil yang didapatkan menjadi PMI sangat cukup dan sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai ekonomi keluarga. Kini hampir semua keluarga yang bekerja menjadi PMI non prosedural tercatat ekonominya meningkat. Sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk ke Malaysia hanya untuk mencari kerja, dan hampir semua dari pihak keluarga

---

<sup>13</sup> <https://hendivaislamis.wordpress.com/2015/11/22/dampak-pengiriman-tki/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 13:12 Wib.

memberi izin kepada salah satu keluarga mereka untuk menjadi PMI non prosedural dibandingkan menjadi PMI prosedural. Walaupun menjadi PMI non prosedural tidak ada perlindungan dari negara Indonesia sendiri.

Adapun alasan dan ketertarikan penulis pada Kabupaten Karimun adalah: *pertama*, Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten yang terletak bersebelahan atau berbatasan langsung dengan Kukup Johor Malaysia yang hanya dibatasi oleh laut; *kedua*, nilai UMK yang lumayan tinggi yang menjadikan penulis tertarik melihat perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Karimun; *ketiga*, Kabupaten Karimun sebagai Kabupaten yang dipercayai sebagai pusat bea dan cukai; *keempat*, Kabupaten Karimun mayoritas bersuku melayu yang sama dengan Malaysia, sehingga ini merupakan salah satu jalan mempermudah untuk berkomunikasi dan menggali data.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Malaysia?
2. Bagaimana dampak dari bekerjanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Malaysia bagi peningkatan perekonomian keluarga di Kabupaten Karimun?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Malaysia yang berasal dari Kabupaten Karimun.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari bekerjanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Malaysia bagi peningkatan perekonomian keluarga di Kabupaten Karimun.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang bebas masuknya visa turis atau pelancong yang dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi masyarakat Kabupaten Karimun untuk peningkatan ekonomi dengan tanpa menyalahgunakan pasport visa turis atau pelancong.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk melihat keaslian yang akan dihasilkan melalui penelitian ini maka ada perlunya disajikan beberapa hasil kajian

penelitian yang sudah diteliti dan berhasil dalam Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan peningkatan nilai ekonomi. Berikut beberapa penelitian itu adalah sebagai berikut :

*Pertama:* Pujastuti Intan Surya Putri, 132030223 (2017), **“Kerjasama Indonesia dan Malaysia Dalam Penanganan TKI Ilegal di Malaysia”**. Mahasiswa Universitas Pasundan Jurusan Hubungan Internasional. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, namun penelitian ini berfokus pada kerjasama bilateral antar negara dan berbeda sama penelitian penulis yang lebih berfokus pada pengaruhnya terhadap peningkatan nilai ekonomi. Namun, pada permasalahan ini penulis juga mencari penanganan yang patut dilakukan untuk menangani TKI ilegal dari Indonesia, khususnya dari Kabupaten Karimun. Dan pada penelitian ini, Pujastuti Intan Surya Putri lebih condong menyinggung pada instansi pemerintahan, dibandingkan keluarga TKI ilegal.<sup>14</sup>

*Kedua,* Ana Susanti, 3401401041 (2005), **“Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Klaling Jekulo-Kudus”**. Penelitian ini dibuat oleh mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Pujastuti Intan Surya Putri, 132030223, *Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam penanganan TKI ilegal di Malaysia*, Universitas Pasundan: 2017.

juga membahas tentang perubahan ekonomi keluarga, bagaimana dampak positif dan negatif sebelum dan sesudah menjadi TKI di Malaysia, hanya saja penelitian ini berfokus pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural sedangkan penulis mengambil fokus pada TKI ilegal atau PMI non prosedural, Ana Susanti bertempat di Desa Klaling Jekulo-Kudus yang dalam artian hanya sebatas Desa, sedangkan penulis mengambil Kabupaten sebagai lokasi penelitian. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif membuat penelitian penulis dan Ana Susanti lebih kepada tahap wawancara dan observasi yang lebih dalam terhadap para pekerja TKI. Dan hasil penelitian dari Ana Susanti adalah, bahwa hampir semua para TKI memiliki pendapatan yang bisa membuat ekonomi keluarganya berkecukupan.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Hari Nasori, (2005) **”Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ekonomi Keluarga yang di Tinggalkan”**. Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini sama membahas tentang dampaknya terhadap ekonomi keluarga seperti penulis, namun penelitian ini lebih ke Tenaga Kerja Wanita (TKW)nya saja. Sama-sama

---

<sup>15</sup> Ana Susanti, 3401401041, Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Klaling Jekulo-Kudus, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Humaniora Universitas Negeri Semarang : 2005.

menggunakan metode penelitian kualitatif, dan pada penentuan informan juga menggunakan teknik *purposive sampling*.<sup>16</sup>

*Keempat*, Sri Mulyati “**Pengaruh TKI dalam Kehidupan Keluarganya (Studi Kasus di Desa Tawang Rejo Kecamatan Wirang Kabupaten Pati Jawa Tengah)**”, mahasiswa jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sri Mulyati adalah hampir sama dengan penulis. Melihat kehidupan keluarga TKI, hanya saja TKI yang ditulis oleh adalah TKI legal, sedangkan penulis memilih TKI ilegal. Pada kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan hasil dari penelitian adalah hampir setiap keluarga TKI memiliki kehidupan keluarga yang semakin sejahtera, hampir para TKI bisa menyekolahkan anak-anaknya. Namun pengaruh yang masuk ke keluarga adalah kurangnya komunikasi dikarenakan jarak yang memisahkan TKI dengan keluarganya, sehingga kedekatan antara TKI dan keluarganya tidak terlalu dekat.

## **G. Kerangka Teori**

### **Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural atau Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang *lowlife* dan *unskill* yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, uganda dan somalia)

---

<sup>16</sup> Hari Nasori, Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ekonomi Keluarga yang di Tinggalkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2005.

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah PMI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena PMI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja *unskill* yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. PMI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).<sup>17</sup>

Menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau PMI di Luar Negeri menjadi dambaan sebagian masyarakat Indonesia pasalnya penghasilan yang diterima tiap bulan jauh lebih besar. Disamping penghasilan yang besar menjadi PMI di luar negeri juga bisa melatih kemampuan bahasa di negara tempat bekerja. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di luar negeri, beberapa persyaratan harus kita penuhi, baik persyaratan administratif maupun skill atau kemampuan kita untuk bekerja pada bidang yang dibutuhkan di luar negeri.<sup>18</sup>

Begitu juga dengan TKI ilegal atau PMI non prosedural yang ada di Indonesia. Banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya wilayah perbatasan yang sengaja masuk ke luar negeri dengan tujuan mencari pekerjaan.

Menurut penelitian Hari Nasori, pemilihan menjadi TKI terutama pekerjaannya adalah wanita, atau lebih dikenal dengan sebutan TKW memutuskan bekerja di luar negeri adalah hal yang tersulit, karena memang harus rela meninggalkan keluarga, apalagi yang masih beumur 30-an, mereka dengan rela meninggalkan

---

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia) diakses pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 10:42 wib

<sup>18</sup> <http://www.infonews.web.id/2013/10/cara-dan-syarat-menjadi-tki-di-luar.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 23:22 wib.

anak-anak mereka demi membantu suami mencari nafkah. Bahkan ada juga TKW yang janda dan memang terpaksa harus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kebanyakan mereka bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di Malaysia, itu karena mereka memiliki pendidikan yang rendah, dan pekerjaan yang dipercayai adalah menjadi ART.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, PMI non prosedural muncul karena banyaknya calo-calo yang membuka rekrutmen dengan daya tarik mempermudah para masyarakat yang mau bekerja di luar negeri. Biasanya calo-calo datang langsung turun ke desa-desa untuk mencari para pekerja yang mau bekerja di luar negeri dengan pungutan biaya yang tinggi, namun ilegal. Karena pada hukumnya, yang wajib mengantarkan PMI adalah Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan PJTKI (Perusahaan Jasa Pengerah dan Tenaga Kerja Indonesia) setiap daerah yang memiliki surat izin usaha. Di Jakarta banyak calon PMI yang menempuh jalur ilegal karena tidak perlu repot mengurus dokumen-dokumen seperti paspor, visa, dan asuransi sehingga mempercepat dan memperpendek tahapan prosedur yang harus dilalui calon PMI untuk berangkat ke luar negeri.<sup>20</sup>

Selain itu, proses adanya PMI non prosedural lebih mengalir pada bagian administratif yang dilanggar, selain tentang

---

<sup>19</sup> Hari Nasori, Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ekonomi Keluarga yang di Tinggalkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2005.

<sup>20</sup> Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, ringkasan skripsi oleh Alam Mahardika dan Argo Prambudi, M.Si.

kepemilikan paspor, prosedur kepemilikan visa, juga adanya pemalsuan identitas diri, seperti usia, nama orang tua, dan alamat asal. Hal ini banyak sekali dilakukan oleh perusahaan penyalur, dan merupakan gambaran kemudahan perekrutan PMI secara ilegal atau non prosedural.<sup>21</sup>

Tidak jauh dengan DKI Jakarta, di kota-kota lain seperti Subang, Bandung, Wonosobo, NTT, dan lainnya, para PMI menjadi non prosedural atau ilegal dikarenakan mereka mengikuti calo-calo perusahaan penyalur tanpa izin usaha. Banyak kasus yang terjadi akibat menjadi PMI non prosedural ini, baik itu di deportasi, di hukum dan penjara, bahkan sampai di penghujung nyawa.

Seperti kasus di bulan Juli 2017 terkait deportasi PMI non prosedural dari Malaysia, jumlah yang dideportasi mencapai 4.863 pekerja oleh pemerintah Malaysia sejak Januari 2017. Hingga pada bulan Juli 2017 terdapat 611 pekerja di deportasi di Pelabuhan Pasir Gudang Johor Bahru. Kesalahan terletak pada penyalahgunaan izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal, serta ada yang tidak memiliki paspor dan masuk tidak melalui pintu resmi.<sup>22</sup> Sedangkan 2016, mencapai 4.011 pekerja non prosedural yang di deportasi oleh pemerintah Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. PMI non prosedural berasal dari NTT, NTB, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan berasal dari Pulau Jawa. Dan diketahui mereka menjadi TKI

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/12270071/sejak-januari-2017-4.863-tki-ilegal-dideportasi-dari-malaysia> diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 01:27 WIB.

ilegal dengan mengikuti calo tanpa adanya asuransi dan perlindungan.<sup>23</sup>

Semarang, Maret 2018. Polisi mengamankan 34 PMI non prosedural asal Bima NTB. Mereka berangkat dari Bima menuju Surabaya menggunakan Bus, dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak menggunakan kapal laut, dan langsung ke Malaysia. Namun sayangnya, perjalanan ke Pontianak harus menunggu seminggu, dan mereka mengambil alih lewat Semarang, sesampainya di Semarang, mereka ketahuan oleh pihak kepolisian dan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Mereka diketahui non prosedural karena hanya membawa KTP dan paspor untuk bekerja di Malaysia. Mereka menjadi PMI non prosedural tanpa adanya penyalur yang sah, bahkan belum jelas kedatangan mereka di Malaysia nanti akan bekerja apa.<sup>24</sup>

Kembali pada Juli tahun 2018, salah satu PMI non prosedural asal Subang yang menjadi PMI di Malaysia meninggal dunia, Heriah, disebabkan karena sakit yang dideritanya. Ia masuk ke Malaysia melalui seseorang penyalur, yang bukan dari suatu perusahaan. Ia dikenalkan oleh seorang yang berada di Tanjung Pinang Kepri untuk masuk ke Malaysia, dan di Malaysia sudah ada yang menunggu untuk mengambil dia menjadi pekerja. Masuk

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> [https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3899678/polisi-semarang-gagalkan-keberangkatan-34-tki-ilegal-asal-bima?\\_ga=2.149218162.532138856.1543543315-1264088577.1543543315](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3899678/polisi-semarang-gagalkan-keberangkatan-34-tki-ilegal-asal-bima?_ga=2.149218162.532138856.1543543315-1264088577.1543543315) diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 02:12 WIB



dengan menggunakan paspor pelancong dan menetap di Malaysia sudah bertahun-tahun, dengan tidak pernah pulang ke tanah air.<sup>25</sup>

Permasalahan penanganan PMI non prosedural merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari PMI yang adalah ilegal atau penghuni ilegal di suatu negara. Ilegal merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan di bidang imigrasi. Apabila tertangkap, para PMI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang mana ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para PMI itu sendiri. Selain itu, tidak dapat dikesampingkan pula perlakuan aparat penegak hukum di negara PMI non prosedural berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada. Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan PMI non prosedural yang tidak tercatat dalam dokumen resmi yang memberikan jaminan bagi para PMI berupa perlindungan yang sepatutnya dari aparat negara asal PMI dan aparat negara penerima PMI.<sup>26</sup>

Hal ini sama seperti yang diucapkan oleh Elsi Rosalia selaku kepala P4TKI Tanjung Balai Karimun, bahwa TKI ilegal

---

<sup>25</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4202171/sindikatan-penyalar-tki-ilegal-asal-subang-diringkus? ga=2.148562803.532138856.1543543315-1264088577.1543543315> diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 01:24 WIB

<sup>26</sup> Penanganan Masalah TKI ilegal oleh pemerintah RI. Internasional law in news. 2008

atau PMI non prosedural tidak ada perlindungan sesuai hukum, tapi karena adanya hati nurani P4TKI Tanjung Balai Karimun selalu melindungi PMI non prosedural tersebut dengan cara membawa pulang mereka dan direhabilitasi di provinsi.

Berikut adalah point-point penting seseorang jika ingin menjadi PMI prosedural yang perseorangan atau biasa disebut dengan TKI Mandiri.

- Calon PMI mandiri atau perseorangan diharuskan mencari sendiri peluang kerja di luar negeri bisa melalui internet, media massa lain atau melalui kenalan yang berada di luar negeri. Dalam hal ini Calon PMI berhubungan langsung dengan penyedia pekerjaan di luar negeri tanpa melalui perantara.
- Penyedia pekerjaan di luar negeri haruslah penyedia pekerjaan yang resmi dan memiliki badan hukum dan tidak dibenarkan Calon PMI Perseorangan bekerja pada pengguna perseorangan.
- Pihak pemberi pekerjaan mengirimkan rancangan perjanjian kerja, pelajari dengan seksama rancangan perjanjian tersebut sebelum melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja, hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <http://www.infonews.web.id/2013/10/cara-dan-syarat-menjadi-tki-di-luar.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 23:22 wib.

Dan berikut ini adalah prosedur yang harus dimiliki seorang calon PMI:

1. Calon PMI laporan kepada Dinas Kabupaten/Kota bidang ketenagakerjaan serta melakukan pendaftaran sebagai pencari kerja untuk didata dan selanjutnya akan mendapatkan kartu kuning (AK 1).
2. Melampirkan Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup dan bukti kompetensi kerja kepada penyedia pekerjaan di luar negeri.
3. Penyedia pekerjaan di luar negeri akan melakukan proses seleksi berdasarkan CV yang dikirimkan, apabila disetujui maka penyedia pekerjaan akan mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja.
4. Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka penyedia pekerjaan akan mengirim Rancangan Perjanjian Kerja dan Visa Kerja kepada calon PMI untuk ditandatangani.
5. Calon PMI datang ke kedutaan atau perwakilan negara di mana yang bersangkutan akan bekerja untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai keberadaan dan legalitas penyedia pekerjaan dan Visa Kerja untuk selanjutnya akan diberi pengesahan oleh pihak kedutaan atau perwakilan negara yang bersangkutan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <http://www.infonews.web.id/2013/10/cara-dan-syarat-menjadi-tki-di-luar.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 23:22 wib.

### **Keluarga PMI Prosedural Maupun Non Prosedural**

Keluarga PMI adalah bagian masyarakat yang terdiri dari suami, istri, ayah, ibu dan anak-anak dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga dan salah seorang atau lebih anggota keluarganya bekerja di luar negeri.<sup>29</sup>

### **Perekonomian Keluarga**

Manusia disebut sebagai *homoeconomicus*, yaitu suatu makhluk yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Diantara sekian banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia termasuk makhluk yang beruntung karena untuk memenuhi kebutuhannya tersebut telah dibekali alat pembantu yang sangat berharga berupa pikiran, sehingga di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dapat melakukan tindakan pilihan dari berbagai alternatif yang mungkin dengan pertimbangan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Disinyalir bahwa kebutuhan manusia relatif tidak terbatas sementara alat pemuas kebutuhan manusia relatif terbatas. Adanya dua hal yang bersangkutan tersebut menimbulkan masalah, selanjutnya disebut masalah ekonomi.<sup>30</sup> Istilah keluarga (families) dan rumah tangga (household) cukup sulit untuk dibedakan.

---

<sup>29</sup> Ana Susanti, 3401401041, Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Klaling Jekulo-Kudus, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Humaniora Universitas Negeri Semarang : 2005.

<sup>30</sup> Tati Suhartati Joesron dan M. Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

Menurut Plato, keluarga adalah unit sosial pertama dari perkembangan masyarakat menuju negara kota.<sup>31</sup>

Istilah ekonomi keluarga harus didahului dengan penjelasan tentang konsep ekonomi. Ekonomi sebagai disiplin ilmiah (atau ilmu), termasuk ke dalam ilmu sosial yang mengkaji masalah utama, yakni kelangkaan, suatu kondisi yang disebabkan oleh kombinasi yang tidak seimbang antara *keinginan yang tidak terbatas* dan *sumber daya yang terbatas*. Disebabkan adanya kelangkaan, pilihan dan pengambilan keputusan merupakan topik penting dari kajian ekonomi. Dengan kajian ekonomi, rumah tangga merasa terbantu dalam cara mengambil keputusan yang lebih baik, juga membantu menentukan pilihan terbaik bagi rumah tangga.<sup>32</sup>

Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga”. Status berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara). Di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aristoteles : “Bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur,

---

<sup>31</sup> Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada ditengah-tengahnya”.<sup>33</sup>

Perubahan ekonomi yang dimaksud disini adalah perubahan ekonomi keluarga kearah yang lebih baik. Perubahan kearah yang lebih baik dapat diartikan sebagai perubahan dalam arti *progress* yaitu perubahan yang menjadi satu kemajuan bagi masyarakat. Kemudahan-kemudahan akan dapat diperoleh masyarakat lewat perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya dengan peningkatan pendapatan sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.<sup>34</sup>

Perubahan ekonomi meliputi :

- a. Peningkatan penghasilan atau pendapatan.
- b. Konsumsi dan gaya hidup
- c. Peningkatan kesejahteraan
- d. Kualitas kesehatan
- e. Peran dan status
- f. Perluasan jaringan sosial
- g. Pendidikan.<sup>35</sup>

Pada saat keluarga hidup dalam situasi kelangkaan sumber daya, maka keluarga harus mengetahui cara menggunakan sumber

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990), hlm. 251.

<sup>34</sup> Ana Susanti, 3401401041, Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Klaling Jekulo-Kudus, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Humaniora Universitas Negeri Semarang : 2005.

<sup>35</sup> *Ibid*

daya dan menentukan pilihan yang bijaksana.<sup>36</sup> Kajian ekonomi keluarga akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan keluarga. Kebutuhan adalah pokok untuk bertahan hidup termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah cara untuk mengekspresikan kebutuhan. Makanan, misalnya, merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup.<sup>37</sup>

Kehidupan ekonomi bisa saja meliputi perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depannya, baik itu perubahan yang naik ke atas atau perubahan yang turun ke bawah. Misal pada peningkatan pendapatan atau penghasilan, konsumsi dan gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut adalah proses dari perekonomian keluarga.

Berhubungan dengan fungsi penyelenggaraan kebutuhan keluarga maka orang tua diwajibkan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya agar supaya setiap anggota keluarga dapat cukup makan, minum, cukup pakaian serta tempat tinggal. Dalam kehidupan keluarga bapak sebagai kepala keluarga dan sebagai pemegang kekuasaan mempunyai peranan penting dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Tapi tak jarang dengan semakin majunya peradaban manusia banyak kaum wanita (ibu) juga berkesempatan untuk memegang peranan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga.

---

<sup>36</sup> Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 8.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Jadi dalam kehidupan keluarga tanggung jawab terhadap ekonomi tidak hanya tergantung kepada bapak saja selaku kepala rumah tangga tapi wanita (ibu) dapat ikut berperan serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga.

### **Dampak menjadi PMI**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) benturan; (2) berpengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif).<sup>38</sup> Sedangkan ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.<sup>39</sup> Dampak ekonomi, dengan demikian, adalah suatu akibat baik negatif dan positif terhadap nilai-nilai pada keuangan suatu personal maupun kelompok/keluarga yang berpengaruh besar terhadap nilai kesejahteraan.

Sebelum melihat sisi dampak perekonomian keluarga PMI, di sini akan menjelaskan terlebih dahulu dampak pengiriman PMI. Dampak positif dari pengiriman PMI adalah PMI dapat memperoleh pekerjaan sehingga dapat menghidupi keluarganya masing-masing, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf kehidupan, mengurangi pendapatan penduduk, meningkatkan pendapatan belanja, dan menambah cadangan devisa negara dari sektor non migas. Sedangkan dampak negatif dari pengiriman PMI adalah terjadinya tindakan kekerasan, sulitnya pulang ke kampung

---

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga – cetakan 3, 2005, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 234

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga – cetakan 3, 2005, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 287



halaman, keluarga inti terpisah, meningkatnya angka perceraian, nilai masyarakat kita di negara tujuan menjadi lebih, pergeseran norma budaya, Pembekalan yang kurang dari Agen TKI membuat para TKI mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, seperti upah yang tidak sesuai, kesejahteraan dan kesehatan yang diabaikan majikan.<sup>40</sup>

Adapun dampak dari perekonomian keluarga menjadi PMI adalah memiliki dua dampak, baik itu positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah bahwa salah satu anggota keluarga mereka menjadi PMI mereka dapat dikatakan sejahtera, hidup sejahtera merupakan harapan setiap orang. Harapan sejahtera identik dengan terpenuhinya semua kebutuhan primer maupun sekunder, adanya kenyamanan hidup dan ketentraman hidup. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, misalnya kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Dan dapat dikatakan keluarga tersebut telah menacapai keluarga sejahtera II.<sup>41</sup>

Berikut tahapan keluarga sejahtera :

1. Keluarga pra sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan.

---

<sup>40</sup> <https://hendivaislamis.wordpress.com/2015/11/22/dampak-pengiriman-tki/> diakses pada tanggal 23 Mei 2018, pukul 12:18 Wib.

<sup>41</sup> Ana Susanti, 3401401041, Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Klaling Jekulo-Kudus, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Humaniora Universitas Negeri Semarang : 2005.

2. Keluarga sejahtera I

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial seperti pendidikan, interaksi dalam keluarga dengan lingkungan tempat tinggal, maupun transportasi.

3. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan informasi.

4. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seluruh kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat baik berbentuk uang maupun barang.

5. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan sosial, kebutuhan pengembangan serta telah pula memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>42</sup>

Adapun dampak negatif perekonomian PMI adalah lamanya pengiriman uang hasil pendapatan ke keluarga, karena pada dasarnya bekerja di luar negeri itu jauh. Seperti Malaysia,

---

<sup>42</sup> *Ibid*

Arab Saudi, Korea, dan lain-lain yang memiliki aturan negara yang berbeda-beda. Sehingga sedikit lama untuk sampai pada keluarga, bahkan ada beberapa keluarga yang sudah membutuhkan uang namun belum sampai ke keluarganya dan menjadi keresahan. Dan ada juga, beberapa perusahaan penyalur TKI atau PMI yang mengambil sebagian hasil upah pekerja, dengan modus sebagai penyalur harus dapat sedikit keuntungan dari apa yang telah perusahaan penyalur lakukan.<sup>43</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau, yang beribukotakan di Tanjung Balai Karimun. Adapun pengambilan lokasi penelitian ini karena : *pertama*, Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten yang terletak bersebelahan atau berbatasan langsung dengan Kukup Johor Malaysia. *Kedua*, nilai UMK yang lumayan tinggi. *Ketiga*, Kabupaten Karimun sebagai Kabupaten yang dipercayai sebagai pusat bea dan cukai.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode

---

<sup>43</sup> Hari Nasori, Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ekonomi Keluarga yang di Tinggalkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2005.

kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama-sama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>44</sup>

### **3. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu yang memiliki kemampuan untuk dimintai dan memberikan informasi yang berkaitan dengan lokasi dan keadaan yang akan dilakukan penelitian.<sup>45</sup> Dalam pengertian tersebut penulis memberlakukan subjek penelitian, adalah PMI non prosedural, dan keluarganya. Beserta instansi pemerintahan seperti Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, P4TKI Tanjung Balai Karimun, BPS Kabupaten Karimun, dan Sekretariat Perekonomian Kabupaten Karimun.

### **4. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian dari seorang penulis, objek penelitian lebih mengkaji tentang isi dari permasalahan. Adapun objek dari penelitian ini adalah TKI

---

<sup>44</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.9-10.

<sup>45</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm. 53.

ilegal yang dampaknya terhadap peningkatan nilai ekonomi keluarga di Kabupaten Karimun.

## 5. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data dapat diperoleh dengan konsep tabel berikut :

Rumusan Masalah	Data	Sumber data
Bagaimana proses masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Malaysia?	Proses masuknya PMI non prosedural ke Malaysia dengan menggunakan paspor pelancong 48 halaman.	PMI non prosedural, Imigrasi Tanjung Balai Karimun kelas II
Bagaimana dampak dari bekerjanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Malaysia bagi peningkatan perekonomian keluarga di Kabupaten Karimun?	Kondisi perekonomian keluarga PMI non prosedural beserta tingkat kesejahteraan keluarganya.	PMI non prosedural, keluarga PMI non prosedural

## 6. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan di penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik dengan penentuan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan

tertentu. Adapun penentuan berdasarkan kriteria tersebut adalah:

1. PMI non prosedural

Kriteria PMI non prosedural yang akan dilakukan wawancara, antara lain:

- Laki-laki / perempuan
- Berumur 18-55 tahun
- Menjadi PMI non prosedural kurang lebih 1 bulan
- PMI non prosedural dengan pekerjaan apapun

2. Keluarga PMI non prosedural

Kriteria keluarga PMI non prosedural yang akan dilakukan wawancara, antara lain:

- Yang menjadi darah daging dari keluarga yang menjadi PMI non prosedural
- Baik suami, istri, anak, maupun orang tua bersedia memberi informasi terkait salah satu anggota keluarganya yang menjadi PMI non prosedural, dan merupakan keluarga yang masih tinggal bersama dalam satu rumah sehingga mampu menjelaskan apa yang mereka dapatkan dari salah satu keluarganya yang bekerja menjadi PMI non prosedural.

3. Instansi Pemerintahan

- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, adalah seseorang yang menjabat sebagai ketua di dinas tersebut dan sudah tercatat di akte notaris daerah atau yang mewakili.

- Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun, adalah seseorang yang menjabat sebagai ketua dan juga tercatat di akte notaris daerah atau yang mewakili.
- Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, adalah seseorang yang menjabat sebagai ketua atau kepala bagian (kabag) tersebut yang tercatat di akte notaris daerah atau yang mewakili.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Karimun, lembaga pemerintahan yang mengusut data daerah.
- P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia), adalah seseorang yang menjabat sebagai ketua dan memimpin lembaga tersebut atau yang mewakili.

Dari pemilihan kriteria tersebut, penulis telah mendapatkan informan yang bersedia untuk diwawancarai. Penulis berhasil mewawancarai 6 TKI ilegal atau PMI non prosedural, beserta salah satu keluarganya, dan pihak-pihak kantor pemerintahan yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Novi Indah Fatmala Lubis, 22 tahun (PMI non prosedural)
2. Tamrin, 52 tahun (PMI non prosedural)
3. Tiar Alvacino Fernando, 23 tahun (PMI non prosedural)
4. Junaidah, 49 tahun (PMI non prosedural)
5. Latif, 50 tahun (PMI non prosedural)
6. Amri, 39 tahun (PMI non prosedural)

7. Isak, 53 tahun (Bapak PMI non prosedural)
8. Sunardi, 26 tahun (Anak PMI non prosedural)
9. Dedy Kurniawan, 24 tahun (Anak PMI non prosedural)
10. Sri Widarsih (Kasi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun)
11. Rahma Nurlida (Kasi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun)
12. Waldi (kepala Tata Usaha Kantor Imigrasi kelas II Kabupaten Karimun)
13. Dr. Abdullah, S.Sos, M,Si (Kepala BPKAD Kabupaten Karimun)
14. Rahimah, S.E, M.E (Kasubag Inspektorat Kabupaten Karimun)
15. Ahmad AR (Sekretaris Camat Tebing)

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah bertanya secara langsung dengan informan untuk mendapatkan kepentingan jawaban. Wawancara ini dilaksanakan dengan bentuk wawancara perorangan dan wawancara kelompok. Wawancara perorangan akan dituju kepada PMI non prosedural dan kepala-kepala dinas yang berkaitan. Dan wawancara kelompok dituju pada keluarga PMI non prosedural dan masyarakat setempat.

### **b. Observasi**

Observasi adalah proses mengamati secara langsung di tempat kejadian untuk mendapatkan



kepentingan jawaban juga. Setelah diamati, peneliti diharapkan mencatat segalanya yang bisa disajikan dan kemudian dianalisis. Dalam hal ini, peneliti dapat melihat secara langsung proses kehidupan yang dilakukan PMI non prosedural dan keluarganya serta masyarakat di tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan arsip, gambar dan dokumen. Misalkan adalah gambar pada kegiatan PMI non prosedural yang dilakukan di Malaysia maupun di dalam keluarga di tempat tinggal mereka. Atau arsip dokumen tentang pendapatan daerah, perekonomian keluarga serta statistik nilai ekonomi Kabupaten Karimun yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas yang bersangkutan.

## 8. Teknik Validasi Data

Yaitu teknik validasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Hal ini akan dicapai dengan membandingkan data hasil wawancara di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan dokumen yang berkaitan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.178.

## 9. Analisis Data

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini bisa didapatkan langsung dengan turun ke lapangan, dan data dapat diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

### b. Reduksi

Reduksi merupakan proses analisis data, yaitu memilah data yang penting dari yang tidak penting kemudian diolah lebih lanjut.

### c. Penyajian Data

Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di susun secara teratur agar mudah dipahami dan dimengerti.

### d. Penarikan Kesimpulan

Siklus terakhir pada penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan, dan kemudian dimulai atau diuji coba lebih lanjut agar program yang dibuat untuk PMI non prosedural dapat dijalani dengan alat ukur sebab akibat.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang dimulai dari maksud judul penulis lampirkan, latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian

dilanjutkan dengan kajian-kajian orang terdulu, dan konsep atau teori pasti yang dibutuhkan penulis. Disambung dengan sub-bab metode penelitian yang bertujuan untuk mempermudah penulis melakukan penelitian.

*Bab kedua*, memuat isi pertama dari pokok permasalahan. Memaparkan gambaran umum terkait hal apa yang menjadi pilihan penulis untuk dilakukan penelitian. Objek dan subjek penelitian yang dijelaskan secara detail. Gambaran umum diawali dengan letak geografis Kabupaten Karimun dan ekonomi masyarakat Kabupaten Karimun.

*Bab ketiga*, penulis memaparkan apa yang tertera di rumusan masalah yang dimulai dari proses masuknya PMI non prosedural ke Malaysia serta beberapa pekerja PMI non prosedural terhadap peningkatan perekonomian keluarganya serta kesejahteraan yang didapatkan selama bekerja menjadi PMI non prosedural di Malaysia, menjelaskan lebih tentang dampak dan pengaruhnya serta perlindungan terhadap PMI non prosedural.

*Bab keempat*, penulis memaparkan kesimpulan yang didapat dari bab-bab sebelumnya terutama pada penjelasan bab kedua dan ketiga beserta saran yang sudah dianalisa penulis sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah apa yang dipaparkan pada bab I, II, dan III. Penulis mengatakan bahwa setiap manusia untuk melengkapi kebutuhan hidup dalam berumah tangga maupun kehidupun pribadi membutuhkan uang untuk segala keperluan. Adapun cara mendapatkan uang adalah dengan bekerja, dan untuk mendapatkan pekerjaan yang ada didaerah memang tergantung nasib dan peluang yang ada. Sehingga ada sebagian memilih menjadi PMI non prosedural. Jadi kesimpulannya adalah:

1. Proses masuknya PMI non prosedural dari Kabupaten Karimun ke Malaysia adalah dengan menggunakan paspor pelancong 48 halaman, dan membayar jaminan kepada tugas *guarantee* dipelabuhan, yang bekerja selama sebulan lalu pulang untuk beberapa hari kemudian masuk lagi ke Malaysia. Mudahnya PMI non prosedural masuk ke Malaysia dikarenakan faktor geografis Kabupaten Karimun yang bersebelahan langsung dengan Malaysia, dan merupakan daerah serumpun.
2. Dampak bekerjanya PMI non prosedural ke Malaysia adalah ekonomi keluarga mereka sudah tergolong meningkat, itu karena penghasilan yang mereka dapatkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan di dalam daerah Kabupaten Karimun. Rata-rata dari mereka sudah bisa menghidupkan kesejahteraan keluarganya masing-masing.

Dan dampak negatif menjadi PMI non prosedural di Malaysia adalah mendapatkan pekerjaan yang musiman dan harus menunggu masuk ke Malaysia kalau sudah ada panggilan pekerjaan.

## **B. Saran**

Dilihat dari proses masuknya PMI non prosedural di Malaysia, banyak saran yang harus penulis sampaikan, pertama adalah kepada pihak pemerintahan Kabupaten Karimun. Seharusnya untuk mengatasi masalah ini, pihak pemerintahan dari Dinas Tenaga Kerja, Kesekretariat Perekonomian, Imigrasi dan P4TKI Tanjung Balai Karimun membuat kerja sama dalam pengurusan keluar masuknya warga Kabupaten Karimun. Pemerintah bisa mengatasi PMI non prosedural menjadi PMI legal/prosedural, memberi penyuluhan tentang pentingnya Undang-undang sehingga menjadi masyarakat yang baik yang mematuhi aturan dan tidak melanggarnya.

Kemudian membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Karimun sehingga masyarakat yang bekerja di Malaysia berkurang, atau mungkin membuat wewenang kebijakan atau pun perjanjian antara Kabupaten Karimun dengan negara Malaysia. Mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Karimun, bisa saja memanfaatkan aset maupun sumber daya alam yang bisa dikembangkan seperti pengembangan masyarakat berbasis pulau wisata, meningkatkan ekonomi mikro, dan pemanfaatan perdagangan bebas FTZ (Free Trade Zone).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Karimun dalam angka 2017.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Karimun dalam angka 2018.
- Bungin, Burhan,. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014).
- Doriza, Shinta., *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Joesron, Tati Suhartati dan M. Fathorrazi., *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga – cetakan 3, 2005, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mulyani, Sri., *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Keluarganya (Studi Kasus di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)
- Nasori, Hari., *Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ekonomi Keluarga yang di Tinggalkan*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)
- Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017.
- Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2015.
- Profil Pembangunan Kabupaten Karimun, 2014.

Putri, Pujastuti Intan Surya., *Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam penanganan TKI ilegal di Malaysia*, (Universitas Pasundan: 2017).

Susanti, Ana., *Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Klaling Jekulo-Kudus* (Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Humaniora Universitas Negeri Semarang : 2005).

Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990).

Undang-undang Malaysia Akta 150 Akta Pasport.

Undang-undang Malaysia Akta 155 Akta Imigresyen.

Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

### **Sumber Internet**

Batampos.com, *Karimun ranking 7 trafficking*.  
<https://batampos.co.id/2017/10/11/karimun-ranking-7-trafficking/>

Detik.com. *Sindiket Penyalur TKI ilegal asal Subang diringkus?*  
[https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4202171/sindiket-penyalur-tki-ilegal-asal-subang-diringkus?\\_ga=2.148562803.532138856.1543543315-1264088577.1543543315](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4202171/sindiket-penyalur-tki-ilegal-asal-subang-diringkus?_ga=2.148562803.532138856.1543543315-1264088577.1543543315)

Dosen Ekonomi, *Ilmu Ekonomi, Contoh ekonomi kerakyatan.*  
<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/contoh-ekonomi-kerakyatan>

Infonews.com,

<http://www.infonews.web.id/2013/10/cara-dan-syarat-menjadi-tki-di-luar.html>

Karimunkab.go.id, *Perkembangan Investasi Kabupaten Karimun.*  
<https://karimunkab.go.id/perkembangan-investasi-kabupaten-karimun/>

Kepri.antaranews.com, *Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim.*  
<https://kepri.antaranews.com/berita/43090/karimun-sebagai-pusat-pertumbuhan-ekonomi-berbasis-maritim>

Kompas.com, Ambaranie Nadia, *Sejak Januari 2017, 4.863 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia*  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/12270071/sejak-januari-2017-4.863-tki-ilegal-dideportasi-dari-malaysia>.

kukupferry.com, *Perjalanan pelabuhan Kukup Malaysia.*  
<http://www.kukupferry.com/#Perjalanan>

lendoot.com, *Imigrasi Tanjung Balai Karimun cekal 99 WNI.*  
<http://lendoot.com/januari-hingga-maret-2018-imigrasi-karimun-cekal-99-wni/>

Lepank.com, *Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli*  
<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-pengaruh-menurut-beberapa.html>

Riolan, *Wisata Go Kabupaten Karimun.*  
<https://www.wisatago.com/kabupaten-karimun/>

Sadewo, Ari. *Indikator Ekonomi Kabupaten Karimun tahun 2014.*  
[https://www.researchgate.net/profile/Erie\\_Sadewo/publication/311901529\\_Indikator\\_Ekonomi\\_Kabupaten\\_Karimun\\_Tahun](https://www.researchgate.net/profile/Erie_Sadewo/publication/311901529_Indikator_Ekonomi_Kabupaten_Karimun_Tahun)



<2014/links/5860c38708ae8fce49041e73/Indikator-Ekonomi-Kabupaten-Karimun-Tahun-2014.pdf>

Sukresno, Hendiva Islami. *Dampak Pengiriman TKI*.

<https://hendivaislamis.wordpress.com/2015/11/22/dampak-pengiriman-tki/>

Wikipedia, *Tenaga Kerja Indonesia*

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAWS OF MALAYSIA**

**REPRINT**

**Act 155**

**IMMIGRATION ACT 1959/63**

*Incorporating all amendments up to 1 January 2006*

Cover Undang-Undang Malaysia Akta 155 Akta Imigresen 1959/63



# **LAWS OF MALAYSIA**

**REPRINT**

**Act 150**

## **PASSPORTS ACT 1966**

*Incorporating all amendments up to 1 January 2006*

Cover undang-Undang Malaysia Akta 150 Akta Pasport 1966



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan

Cover Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 tentang  
Keimigrasian

Tindakan pidana pemerkasaan pasal 89.



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
  - c. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
  - d. bahwa . . .

Cover Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 tentang  
Pekerja Migran Indonesia

## PEDOMAN WAWANCARA

### Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pendapat (saudara/i yang bersangkutan) tentang tenaga kerja di Kabupaten Karimun?
2	Bagaimana peluang pekerjaan di Kabupaten Karimun?
3	Bagaimana mengatasi Jumlah penduduk yang tak seimbang dengan peluang pekerjaan?
4	Bagaimana pendapat (saudara/i yang bersangkutan) tentang masyarakat yang memilih menjadi TKI ilegal di Malaysia?
5	Berapa pendapatan para TKI ilegal dibandingkan dengan honorer di Kabupaten Karimun?
6	Pendapat (saudara/i yang bersangkutan) tentang UMK yang tak sebanding dengan jumlah pendapatan para pekerja?
7	Hal lanjut apakah yang akan dilakukan jika pemerintah Kabupaten Karimun mengetahui tentang masyarakat yang menjadi TKI ilegal?
8	UU terkait para TKI ilegal jika terkena permasalahan baik itu dibagian Imigrasi maupun bagian mental (bisa saja karena kekerasan dan upah yang tak sesuai)?
9	Pendapat (saudara/i yang bersangkutan) jika menjadi TKI ilegal membuat peningkatan pada nilai perekonomian keluarga di Kabupaten Karimun?
10	Pendapat (saudara/i yang bersangkutan) jika TKI ilegal bisa mensejahterakan kehidupan ekonomi keluarga tanpa bantuan pemerintah?

### Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun

No	Pertanyaan
1	Apa saja syarat-syarat pembuatan pasport?
2	Jenis-jenis pasport?
3	Harga nominal membuat pasport?
4	Berapakah jumlah rata-rata pegunjung ke luar negeri dalam sehari?
5	Berapakah jumlah rata-rata pengunjung Malaysia dalam sehari?
6	Menuju Malaysia terdapat dua pelabuhan, pelabuhan Kukup dan pelabuhan Harbour Putri, manakah yang lebih banyak penumpang untuk masuk ke Malaysia? Alasannya?
7	Tujuan rata-rata masyarakat Kabupaten Karimun ke Malaysia?
8	Berapa lamakah waktu yang diperbolehkan untuk masuk ke luar negeri?
9	Bagaimana cara mendapatkan visa?
10	Apakah kegunaan visa?
11	Jika ada masyarakat yang menyalahgunakan pasport, menggunakan pasport pelancong sebagai media untuk mencari pekerjaan di Malaysia atau Singapura, hal tindak lanjut apakah yang akan dilakukan?
12	Dari berbagai macam informasi, banyak masyarakat yang menggunakan pasport pelancong tersebut untuk mencari pekerjaan di Malaysia, apakah pihak imigrasi mengetahui hal tersebut?
13	Apakah ada hukum negara tentang penyalahgunaan pasport tersebut?
14	Jika dikaitkan dengan peluang pekerjaan di Kabupaten Karimun dan jumlah penduduk yang tak seimbang, sehingga masyarakat lebih memilih mencari pekerjaan ke Malaysia atau Singapura, apakah pendapat (saudara/i yang bersangkutan) ?
15	Melalui wawancara dan observasi kepada Pekerja Migran Indonesia non prosedural atau dulu lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia ilegal, banyak yang sekarang

	ekonominya meningkat, tanpa bantuan pemerintah, jadi apakah itu termasuk faktor yang sangat bagus untuk mereka menjadi TKI ilegal?
16	Jika pihak imigrasi Malaysia mengetahui adanya para pekerja yang datang dari Karimun (TKI ilegal), apakah mereka tetap mengizinkan pekerja tersebut masuk ke Malaysia?
17	UU terkait Imigrasi?
18	Apakah pihak Imigrasi Kabupaten Karimun dan Imigrasi Malaysia ada bekerjasama terkait para pekerja migran Indonesia non prosedural ini?

### **Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun**

No	Pertanyaan
1	Jumlah penduduk Kabupaten Karimun?
2	Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan?
3	Data tenaga kerja masyarakat Kabupaten Karimun?
4	Data hasil pendapatan masyarakat Kabupaten Karimun sesuai pekerjaan?
5	Data jumlah pekerja TKI legal?
6	Data perekonomian masyarakat dari tahun ke tahun?
7	Jumlah perkembangan UMK Kabupaten Karimun?
8	Jumlah tingkat kemiskinan Kabupaten Karimun?

### **P4TKI Kabupaten Karimun**

No	Pertanyaan
1	Apa saja syarat-syarat menjadi TKI?
2	Bagaimana proses penempatan pekerjaan para TKI?
3	Bagaimana proses P4TKI dalam perlindungan para TKI?
4	Jika ada TKI ilegal, apakah pihak P4TKI mau membantu para TKI ilegal jika terkena masalah?
5	Jika TKI ilegal tertangkap di negara tempatnya bekerja, apakah pihak pemerintah Kabupaten menolong dalam hal kuasa



	hukum?
6	Bagaimana hubungan kerja sama P4TKI dengan pemerintahan Kabupaten Karimun, khususnya Dinas Ketenaga Kerjaan dan Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun?
7	Bagaimana hubungan kerja sama P4TKI dengan pemerintah luar negeri khususnya Malaysia?
8	Apakah para TKI ilegal tidak ada perlindungan?
9	UU terkait perlindungan TKI?
10	Hal tindak lanjuti terkait TKI ilegal yang masuk ke Malaysia? Atau negara lainnya?

### **Bagian Ekonomi Kesekretariatan Kabupaten Karimun**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perkembangan ekonomi di Kabupaten Karimun?
2	Apakah perkembangan ekonomi Kabupaten Karimun saat ini sudah standar dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia?
3	Apakah pendapatan masyarakat Kabupaten Karimun sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Karimun?
4	Bagaimana cara pemerintah kabupaten Karimun me

### **TKI Ilegal**

No	Pertanyaan
1	Pernah bekerja atau sedang bekerja menjadi TKI ilegal?
2	Alasan menjadi TKI ilegal?
3	Jenis pekerjaan yang didapatkan menjadi TKI ilegal?
4	Cara mendapatkan pekerjaan di Malaysia?
5	Caranya bisa datang ke Malaysia?
6	Alasan memilih Malaysia menjadi tempat mencari kerja?
	Jumlah upah dalam perhari dan perbulan?
7	Apakah upah berkecukupan untuk kehidupan keluarga?

8	Materi yang sudah terlihat dari hasil menjadi TKI ilegal?
9	Menjalani kehidupan di Malaysia?
10	Makan, tempat tinggal, transportasi di Malaysia?
11	Perizinan dari keluarga diperbolehkan atau tidak? Beserta alasan?
12	Apakah keluarga merasa berkecukupan jika salah satu anggota keluarga menjadi TKI ilegal di Malaysia?
13	Jika pemerintahan tahu mengenai hal ini, apakah TKI ilegal mau berhenti menjadi TKI ilegal?
14	Jika pemerintah memberi peluang pekerjaan apakah TKI ilegal mau mengambil kesempatan?
15	Hal yang dilakukan setelah berhenti menjadi TKI ilegal?
16	Hal yang dilakukan jika terkena pemutihan dari Malaysia?

### PEDOMAN OBSERVASI

No	Pedoman	Keterangan
1	Keadaan Pelabuhan Kukup Malaysia	Media sosial
2	Keadaan Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun	Media sosial
3	Keadaan Pelabuhan Puteri Harbour Johor	Media sosial
4	Keadaan ekonomi keluarga TKI ilegal	Dokumentasi pribadi, dokumentasi Kabupaten.

### PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Pedoman	Keterangan
1	Sejarah Kabupaten, Profil Kabupaten dan Dinas-dinas yang bersangkutan	Dokumen Kabupaten, media sosial
2	Foto-foto kehidupan TKI ilegal	Dokumen pribadi, media sosial
3	Harga tiket kapal dan jadwal pemberangkatan.	Media sosial

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Rizki Zuriati  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun, 25 Juli 1996  
Alamat : Paya Cincin, RT 003 RW 002 Kelurahan  
Pamak Kecamatan Tebing, Kabupaten  
Karimun, Kepulauan Riau  
Nama Ayah : Syahril  
Nama Ibu : Nurasih, S.Pd  
No HP : 0812 2668 628  
Email : [ririz.rizki25@gmail.com](mailto:ririz.rizki25@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

- a. TK, Tahun Lulus : TK Canggih Puteri, 2002
- b. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 008 Jelutung, 2008
- c. MP/MTs, Tahun lulus : SMPN 3 Tebing, 2011
- d. SMA/MA, Tahun Lulus : SMAN 1 Karimun, 2014
- e. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### C. Pengalaman Organisasi dan lembaga :

1. Bendahara OSIS SMPN 3 Tebing tahun 2009
2. Ketua Sains Club SMPN 3 Tebing tahun 2008-2009
3. Anggota Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka)  
SMAN 1 Karimun tahun 2011-2014

4. Anggota dan coach Marching Band GEMA Karimun tahun 2011- 2016
5. Bendahara Teater ESKA Yogyakarta
6. Anggota KPMKR-KKJ (Keluarga Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau–Kabupaten Karimun Jogjakarta)

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

**Rizki Zuriati**